



RINGKASAN EKSEKUTIF

GLENARDI. ALOKASI BIAYA OVERHEAD KEPADA LINE OF BUSINESS BERDASARKAN "AB COSTING" DALAM PERHITUNGAN SUKU BUNGA KREDIT (KASUS PT BANK BUKOPIN, JAKARTA), (Dibawah Bimbingan Hamdani M. Syah dan Wahyudi).

Sejak diluncurkannya Deregulasi dibidang perbankan, pertumbuhan perbankan begitu pesat. Konsekuensi logis atas pertumbuhan tersebut adalah adanya tingkat persaingan yang ketat pada bisnis bank. Di sektor kredit, dalam mengatasi persaingan yang ketat, Bank dituntut untuk tidak hanya memberikan "pelayanan yang prima", lebih dari itu bank dituntut juga untuk dapat memberikan suku bunga kredit yang relatif lebih rendah dari pada pesaingnya.

Secara umum besar kecilnya suku bunga kredit dipengaruhi oleh biaya dana (*cost of fund*) dan biaya overhead. Biaya dana sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar, sehingga relatif sulit untuk mengontrolnya (menekannya). Sedang biaya overhead merupakan biaya yang timbul karena aktivitas internal operasional bank, sehingga relatif sudah untuk mengontrolnya (menekannya).

Bank Bukopin, khususnya di kantor pusat memiliki 14 unit bisnis atau *line of business* (LoB) sebagai target marketnya. Dalam upaya untuk menghasilkan suku bunga kredit yang rendah, beban operasional di Bank Bukopin dibagi (dialokasikan) kepada masing-masing LoB, sehingga dalam perhitungan harga pokok penjualannya (HPP) biaya overhead menjadi rendah.

Dalam pembebanan biaya overhead kepada masing-masing LoB, Bank Bukopin hanya menggunakan satu tolok ukur saja sebagai aktivitasnya yaitu biaya tenaga kerja langsung. Menurut para ahli metoda tersebut dapat menimbulkan distorsi, yaitu perhitungan HPP kurang akurat hasilnya. Para ahli memperkenalkan



1. Dilakukan pengutipan bagian-bagian baru atau bagian-bagian yang sudah ada dan dicantumkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilindungi dengan hak cipta dan tidak diperjualbelikan tanpa izin tertulis dari penulis.
© Hak Cipta Dilindungi IPB
Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang Mengumumkan dan memperjualbelikan kembali.

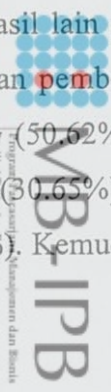
suatu metoda yang dapat memberikan hasil yang lebih akurat, yaitu metoda AB Costing

berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menggambarkan cara perhitungan HPP berdasar AB Costing sekaligus mengetahui perbedaan atau disosor dari perhitungan HPP perusahaan. Selanjutnya mengidentifikasi manfaat lainnya yang dapat memberikan implikasi terhadap keputusan manajemen.

Metoda penelitian bersifat deskriptif studi kasus di PT Bank Bukopin di Kantor Pusat Jakarta, yang dilakukan selama 3 bulan, terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan Oktober 1998. Dalam penelitian tersebut diperlukan data realisasi biaya dana, biaya overhead dan outstanding kredit selama Januari sampai dengan April 1998.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam perhitungan alokasi biaya overhead yang dilakukan perusahaan, terdapat biaya yang tidak dibebankan kepada LoB dengan pertimbangan tertentu, yaitu sebesar Rp. 5.488.529.559,-, sehingga total biaya overhead yang dibebankan kepada LoB dan cabang dengan tolok ukur satu aktivitas, biaya tenaga kerja langsung adalah Rp. 11.016.229.811,- sedangkan dalam perhitungan alokasi biaya overhead AB Costing seluruh biaya overhead dibebankan didasar untuk tidak dibebnkan, karena pendekatannya aktivitas atau sumber daya yang dikonsumsi karena adanya aktivitas tersebut) kepada LoB dan cabang sebesar Rp. 16.498.759.297,- dengan menggunakan 8 aktivitas sebagai tolok ukur yaitu Tenaga Kerja Rp. 7.124.230.144,54; Listrik Rp. 117.289.623,09; ATK Rp. 2.566.711.092,81; Komputer Rp. 156.266.458,52; Bangunan Rp.3.183.391.495,53; Kendaraan Rp. 212.207.979,12; Telepon Rp. 1.848.537.919,65; dan Inventaris Rp. 1.296.124.583,84.

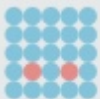
Hasil lain yang perlu disampaikan adalah terdapat 11 LoB yang mengalami kekurangan pembebanan biaya overhead yaitu LoB VI (61.10%), LoB I (56.23%), LoB IBG (50.62%), LoB KUK (50.59%), LoB Mikro (42.04%), LoB II (33.96%), LoB VII (30.65%), LoB III (20.94%), LoB VIII (13.27%), LoB IX (8.4%) dan LoB X (6.10%). Kemudian terdapat 3 LoB yang mengalami kelebihan pembebanan biaya





1. Dilatirang banting babagan an aulit silur kanya tulis ini tarana mancaaturan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hasil karya tulis orang lain dalam karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak langsung dari sumber sekunder yang terdapat dalam karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilatirang banting babagan an aulit silur kanya tulis ini tarana mancaaturan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hasil karya tulis orang lain dalam karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak langsung dari sumber sekunder yang terdapat dalam karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta Milik IPB
Hak cipta dilindungi undang-undang



MB-IPB
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

overhead yaitu LoB XI (42.49%), LoB V (9.68%) dan LoB IV (2.70%). Dampak
loboh lanjut dari hal tersebut adalah terdapat distorsi dalam perhitungan harga pokok
perubahan (HPP), dimana 11 LoB under dan 3 LoB over, dan ini berakibat langsung
terhadap perubahan perolehan spread dari masing-masing LoB. Dan tentunya masing-
masing LoB harus merubah pula *pricing strateginya*.

Beberapa manfaat lain dengan mengimplementasikan AB Costing adalah
dapat diketahuinya tingkat efisiensi masing-masing LoB dalam mengelola kredit.
Kemudian bisa pula mengetahui aktivitas-aktivitas mana yang mengkonsumsi
sumber daya yang banyak sehingga menambah besar biaya overhead.

Dengan memperhatikan kelebihan-kelebihan metode AB Costing, maka sudah
saatnya perusahaan mengimplementasikan metode ini. Dan dalam
mengoperasionalkannya dibutuhkan suatu komitmen yang kuat, khususnya
koordinasi antar direktorat atau bagian yang terkait untuk tidak saling menghambat
dan kemudian merubah administrasi pencatatan transaksi maupun adminnistrasi
dokumentasi.